

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Agama Pekanbaru adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Mahkamah Agung RI yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Pekanbaru mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Pengadilan Agama Pekanbaru. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pekanbaru, 5 Januari 2019
Sekretaris,

dto

Samsir Toona
NIP 19780312.200312.1.003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
Pernyataan Tanggung Jawab	3
Ringkasan	4
I. Laporan Realisasi Anggaran	6
II. Neraca	7
III. Laporan Operasional	8
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	9
V. Catatan atas Laporan Keuangan	10
A. Penjelasan Umum	10
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	28
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	38
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	50
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	57
F. Pengungkapan-Pengungkapan Lainnya	61
VI. Lampiran dan Daftar	



PENGADILAN AGAMA PEKANBARU KLAS I-A

Jalan Datuk Setia Maharaja/Parit Indah, Kota Pekanbaru (28281)

Telepon : 0761-572855, Faksimile : 0761-839718

Email : umum@pa-pekanbaru.go.id

Website: www.pa-pekanbaru.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Pekanbaru yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pekanbaru, 5 Januari 2019

Sekretaris,

dto

Samsir Toona

NIP 197803122003121003

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Pekanbaru Tahun Anggaran 2018 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 adalah berupa Pendapatan Perpajakan dan Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp45.457.419 atau mencapai 126,52 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp35.928.000.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp14.074.218.618 atau mencapai 98,92 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp14.227.332.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2018. Nilai Aset per 31 Desember 2018 dicatat dan disajikan sebesar Rp29.964.401.133 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp7.988.860; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp29.934.169.476; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp22.242.797.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp5.981.561 dan Rp29.958.419.572.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2018 adalah

sebesar Rp35.990.480, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp14.332.550.011 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai -Rp14.296.559.531. Surplus dari Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp7.680.539 dan Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar -Rp14.288.878.992.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2018 adalah sebesar Rp29.535.445.925 ditambah Defisit-LO sebesar -Rp14.288.878.992 kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp15.194.731.133 dan Transaksi Antar Entitas senilai Rp14.763.688.439 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2018 adalah senilai Rp29.958.419.572.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2018 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PENGADILAN AGAMA PEKANBARU LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018 DAN TAHUN 2017

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2018		%	TA 2017 REALISASI
		ANGGARAN	REALISASI		
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	35.928.000	45.457.419	126,5	72.030.897
JUMLAH PENDAPATAN		35.928.000	45.457.419	126,5	72.030.897
BELANJA	B.2				
Belanja Pegawai	B.3	12.700.138.000	12.547.238.218	98,8	12.329.438.149
Belanja Barang	B.4	1.140.444.000	1.140.338.270	100,0	1.001.190.616
Belanja Modal	B.5	386.750.000	386.642.130	100,0	678.504.942
Belanja Bantuan Sosial	B.6	-	-	0,00	-
JUMLAH BELANJA		14.227.332.000	14.074.218.618	98,9	14.009.133.707

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

PENGADILAN AGAMA PEKANBARU NERACA PER 31 DESEMBER 2018 DAN TAHUN 2017

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2018	2017
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.4	-	-
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Lancar	C.7	-	-
Belanja Dibayar di muka (prepaid)	C.8	6.448.560	20.801.400
Uang Muka Belanja (prepayment)	C.9	-	-
Pendapatan yang Masih harus diterima	C.10	-	-
Persediaan	C.11	1.540.300	3.668.600
Persediaan yang Belum Diregister	C.12	-	-
Jumlah Aset Lancar		7.988.860	24.470.000
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR	C.13	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.14	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jangka Panjang	C.15	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET TETAP			
Tanah	C.16	18.399.971.000	18.399.971.000
Peralatan dan Mesin	C.17	2.999.456.028	2.790.276.728
Gedung dan Bangunan	C.18	10.950.485.240	10.348.735.000
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.19	68.696.200	68.696.200
Aset Tetap Lainnya	C.20	977.900	1.415.900
Konstruksi dalam Pengerjaan	C.21	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.22	(2.485.416.892)	(2.044.744.512)
Aset Tetap yang Belum Diregister	C.23	-	-
Jumlah Aset Tetap		29.934.169.476	29.564.350.316
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	C.24	8.881.972	8.881.972
Aset Lain-Lain	C.25	303.397.830	-
Aset Lainnya yang Belum Diregister	C.26	-	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset	C.27	(290.037.005)	(4.581.503)
Jumlah Aset Lainnya		22.242.797	4.300.469
JUMLAH ASET		29.964.401.133	29.593.120.785
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.28	-	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.29	3.776.561	57.674.860
Pendapatan Diterima di Muka	C.30	2.205.000	-
Utang yang Belum Ditagihkan	C.31	-	-
Hibah Langsung yang Belum Disahkan	C.32	-	-
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	C.33	-	-
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.34	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		5.981.561	57.674.860
JUMLAH KEWAJIBAN		5.981.561	57.674.860
EKUITAS			
Ekuitas	C.35	29.958.419.572	29.535.445.925
JUMLAH EKUITAS		29.958.419.572	29.535.445.925
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		29.964.401.133	29.593.120.785

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

PENGADILAN AGAMA PEKANBARU LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018 DAN TAHUN 2017

URAIAN	CATATAN	2018	2017
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1	35.990.480	69.971.370
JUMLAH PENDAPATAN		35.990.480	69.971.370
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	12.526.547.600	12.377.638.448
Beban Persediaan	D.3	53.807.200	59.620.500
Beban Barang dan Jasa	D.4	717.739.227	699.523.366
Beban Pemeliharaan	D.5	320.803.902	230.989.623
Beban Perjalanan	D.6	39.360.000	21.310.071
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	674.292.082	576.813.851
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
JUMLAH BEBAN		14.332.550.011	13.965.895.859
SURPLUS(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(14.296.559.531)	(13.895.924.489)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.11		
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar		-	-
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		-	-
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		-	-
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		-	-
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		-	-
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		-	-
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		7.680.539	2.320.509
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		8.273.039	2.716.697
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		592.500	396.188
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		7.680.539	2.320.509
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(14.288.878.992)	(13.893.603.980)
POS LUAR BIASA	D.12		
Pendapatan PNB		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
JUMLAH POS LUAR BIASA		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(14.288.878.992)	(13.893.603.980)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PENGADILAN AGAMA PEKANBARU LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018 DAN TAHUN 2017

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2018	2017
EKUITAS AWAL	E.1	29.535.445.925	18.240.519.132
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(14.288.878.992)	(13.893.603.980)
KOREKSI YANG MENAMBAH/ MENGURANGI EKUITAS	E.3	(51.835.800)	11.251.427.963
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3.1	-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.2	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.3	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.4	-	11.273.409.438
SELISIH NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.5	(51.835.800)	(1.280.786)
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.6	-	(20.700.689)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	14.763.688.439	13.937.102.810
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		422.973.647	11.294.926.793
EKUITAS AKHIR	E.5	29.958.419.572	29.535.445.925

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Dasar Hukum

*Dasar
Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis*

Penyusunan Laporan Keuangan ini berdasarkan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.05/2016 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 Tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2015 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.05/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK05/2013 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua! Pada Pemerintah Pusat;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.05/2017 Tentang Pedoman Rekonsiliasi dalam Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 81/KM.6/2018 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 Tentang Masa Manfaat dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat;
11. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP 658/PB/2017 Tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP 617/PB/2017 Tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar;
12. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-9861/PB/2018 tanggal 26 Desember 2018, tentang Jadwal Rekonsiliasi, penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan K/L LKKL Tahun 2018 *Unaudited*

- serta Perlakuan Akuntansi Atas Transaksi Akhir Tahun Anggaran 2018;
13. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 06/SEK/KU.00/1/2019 Perihal Pedoman, Perlakuan Akuntansi dan Penyusunan Laporan Keuangan Mahkamah Agung Semester II TA 2018.

A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Pekanbaru

Pengadilan Agama Pekanbaru adalah salah satu dari 359 peradilan tingkat pertama pada lingkungan Peradilan Agama yang eksistensinya diakui dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Perubahan ke III pada Pasal 24 ayat (2) bersama-sama dengan tiga lingkungan peradilan lainnya, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Pengadilan Agama Pekanbaru sebagai peradilan tingkat pertama berada pada urutan pertama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru. Berdirinya Pengadilan Agama Pekanbaru adalah sebagai konsekuensi dari dijadikannya Pekanbaru sebagai ibu kota Kota Pekanbaru karena Pengadilan Agama berada dalam Kota atau Kabupaten yang wilayah hukumnya adalah Kota atau Kabupaten.

Pengadilan Agama Pekanbaru sebagai lembaga yudikatif yang menerima, memeriksa, dan menyelesaikan perkara bagi masyarakat pencari keadilan di wilayah Kota Pekanbaru mempunyai tugas pokok melayani masyarakat di bidang

hukum yang dalam pelaksanaannya harus transparan, akuntabel, dapat diakses oleh publik.

Visi Pengadilan Agama Pekanbaru Tahun 2018 merupakan bagian dari rencana strategis Mahkamah Agung 2015 – 2019 dimana pelaksanaan dan perencanaan sudah berbasis kinerja. Program dan kegiatan Pengadilan Agama Pekanbaru pada tahun 2015 sampai dengan 2019 mengacu pada program-program yang dicanangkan oleh Mahkamah Agung dan dituangkan dalam visi dan misi Pengadilan Agama Pekanbaru.

Visi Mahkamah Agung adalah “TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG”, yang bertujuan agar Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya menjadi lembaga yang dihormati, dimana di dalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu memutus perkara.

Misi Mahkamah Agung:

1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.
2. Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.
3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan.

Kemudian Visi dan Misi Mahkamah Agung tersebut dijadikan acuan bagi Pengadilan Agama Pekanbaru sebagai Visi dan Misinya.

Visi Pengadilan Agama Pekanbaru adalah “TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA PEKANBARU YANG AGUNG”.

Misi Pengadilan Agama Pekanbaru adalah:

1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan;
2. Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan;
3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Agama Pekanbaru melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Meningkatkan penyelesaian perkara;
2. Meningkatkan akseptabilitas putusan Hakim;
3. Meningkatkan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara;
4. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice);
5. Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan;
6. Meningkatkan kualitas pengawasan.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan Agama Pekanbaru. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

*Basis
Akuntansi*

A.3. Basis Akuntansi

Pengadilan Agama Pekanbaru menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu

terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pengadilan Agama Pekanbaru dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester II Tahun 2018 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-

konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Pengadilan Agama Pekanbaru. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Pekanbaru adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-
LRA*

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-
LO*

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.

- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.

Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;

- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin

berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang
Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

*Aset
Lainnya*

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset

kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25

Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban

jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Pengadilan Agama Pekanbaru telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal yaitu penambahan anggaran dari Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI. Hal ini disebabkan oleh adanya Satuan Kerja baru yang belum beroperasi yaitu Pengadilan Agama Siak yang operasionalnya dibebankan kepada Pengadilan Agama Pekanbaru. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	2018	
	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	3.640.000	3.640.000
Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	32.288.000	32.288.000
Jumlah Pendapatan	35.928.000	35.928.000
Belanja		
Belanja Pegawai	12.528.572.000	12.700.138.000
Belanja Barang	985.468.000	1.140.444.000
Belanja Modal	386.750.000	386.750.000
Belanja Bantuan Sosial	-	-
Jumlah Belanja	13.900.790.000	14.227.332.000

B.1 Pendapatan

*Realisasi
Pendapatan
Rp 45.457.419*

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp45.457.419 atau mencapai 126,52 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp35.928.000. Pendapatan di lingkup Pengadilan Agama Pekanbaru berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak. Pendapatan ini berasal dari pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menyelenggarakan penyelesaian perkara yang sederhana, Transparan dan

akuntabel di lingkungan Peradilan Agama.

Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya dapat dilihat sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2018		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	3.640.000	5.908.000	162,31
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	1.391	-
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	-	7.260.548	-
Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	32.288.000	32.287.480	100,00
Jumlah	35.928.000	45.457.419	126,52

Realisasi Pendapatan dari Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan Tahun Anggaran 2018 mengalami kenaikan sebesar 12,57% dibandingkan realisasi TA 2017. Hal ini disebabkan oleh naiknya Pendapatan dari Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan pada Tahun 2018. Terdapat penurunan pendapatan dari Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar 99,93% dibandingkan dengan tahun anggaran yang lalu yang disebabkan menurunnya Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu pada Tahun 2018. Terdapat kenaikan Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar 100,00% dibandingkan dengan tahun anggaran yang lalu yang disebabkan meningkatnya Pendapatan dari Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu pada Tahun 2018. Terdapat penurunan pendapatan dari Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji sebesar 50,11% dibandingkan dengan tahun anggaran yang lalu

yang disebabkan oleh menurunnya Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji pada Tahun 2018.

Perbandingan Realisasi Pendapatan

Uraian	Realisasi TA 2018	Realisasi TA 2017	Naik (Turun) %
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	5.908.000	5.248.460	12,57
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	1.391	2.059.527	-99,93
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	7.260.548	-	-
Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	32.287.480	64.722.910	-50,11
Jumlah	45.457.419	72.030.897	-36,89

B.2 Belanja

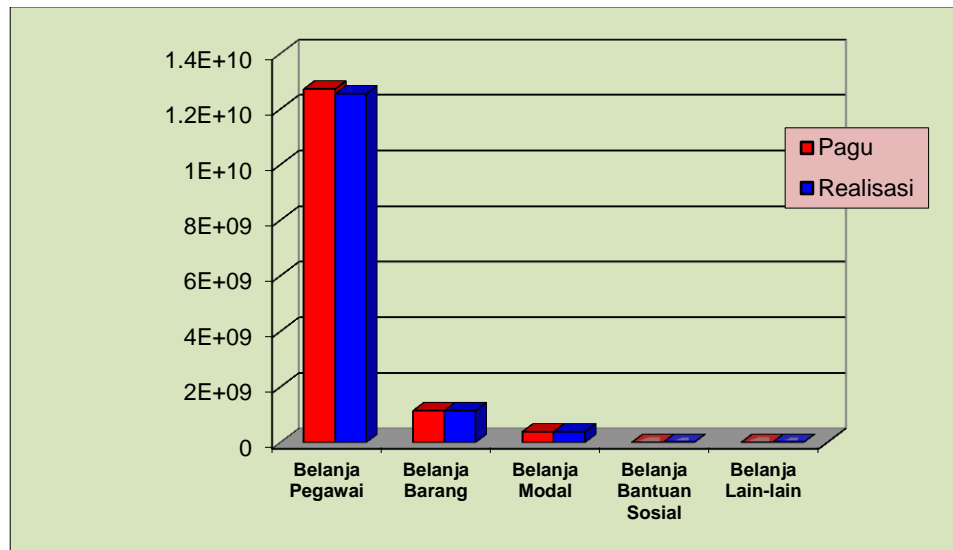
*Realisasi
Belanja Negara
Rp. 14.074.218.618*

Realisasi Belanja pada Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp14.074.218.618 atau 98,80% dari anggaran belanja sebesar Rp14.245.766.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja Tahun Anggaran 2018 tersaji sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja

Uraian	2018		
	Anggaran	Realisasi	% Real
Belanja Pegawai	12.700.138.000	12.698.784.463	99,99
Belanja Barang	1.140.444.000	1.140.338.270	99,99
Belanja Modal	386.750.000	386.642.130	99,97
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Total Belanja Kotor	14.227.332.000	14.225.764.863	99,99
Pengembalian Belanja	-	151.546.245	-
Jumlah	14.227.332.000	14.074.218.618	98,92

Komposisi anggaran dan Ralisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2018 mengalami kenaikan sebesar 0,46% dibandingkan realisasi belanja pada Tahun Anggaran 2017. Hal ini disebabkan antara lain meningkatnya belanja barang untuk mendukung rencana strategis yang dimulai pada Tahun Anggaran 2018.

Perbandingan Realisasi Belanja

Uraian	Realisasi Tahun Anggaran 2018	Realisasi Tahun Anggaran 2017	Naik (Turun) %
Belanja Pegawai	12.547.238.218	12.329.438.149	1,77
Belanja Barang	1.140.338.270	1.001.190.616	13,90
Belanja Modal	386.642.130	678.504.942	-43,02
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	14.074.218.618	14.009.133.707	0,46

Belanja

Pegawai

Rp 12.547.238.218

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2017 adalah masing-masing sebesar Rp12.547.238.218 dan Rp12.329.438.149. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Berdasarkan tabel perbandingan belanja pegawai, realisasi belanja Tahun Anggaran 2018 mengalami kenaikan sebesar 1,77 persen dari realisasi belanja Tahun Anggaran 2017. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Adanya pegawai yang memperoleh kenaikan gaji berkala pada tahun 2018.
2. Dimulainya operasional satuan kerja Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura pada bulan Oktober 2018 yang menyebabkan belanja pegawai Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura tersebut dibebankan kepada Pengadilan Agama Pekanbaru.

Perbandingan Belanja Pegawai

Uraian	Realisasi Tahun Anggaran 2018	Realisasi Tahun Anggaran 2017	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	12.698.784.463	12.329.894.079	2,99
Jumlah Belanja Kotor	12.698.784.463	12.329.894.079	2,99
Pengembalian Belanja Pegawai	151.546.245	455.930	33138,93
Jumlah	12.547.238.218	12.329.438.149	1,77

Belanja

Barang

Rp. 1.140.338.270

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2017 adalah masing-masing sebesar Rp1.140.338.270 dan Rp1.001.190.616. Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2018 mengalami kenaikan 13,90% dari Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2017. Hal ini antara lain disebabkan oleh meningkatnya pengadaan barang/jasa untuk menunjang tugas pokok dan fungsi.

Perbandingan Belanja Barang

Uraian	Realisasi Tahun Anggaran 2018	Realisasi Tahun Anggaran 2017	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	527.129.241	513.106.300	2,73
Belanja Barang Non Operasional	390.750	528.000	-25,99
Belanja Barang Persediaan	73.899.100	74.578.670	-0,91
Belanja Jasa	201.394.077	178.387.014	12,90
Belanja Pemeliharaan	298.165.102	213.705.561	39,52
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	39.360.000	21.310.071	84,70
Jumlah Belanja Kotor	1.140.338.270	1.001.615.616	13,85
Pengembalian Belanja	-	425.000	-100,00
Jumlah	1.140.338.270	1.001.190.616	13,90

Belanja Modal

Rp 386.642.130

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2017 adalah masing-masing sebesar Rp386.642.130 dan Rp678.504.942. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada Tahun Anggaran 2018 mengalami penurunan sebesar 43,02% dibandingkan Tahun Anggaran 2017 disebabkan oleh menurunnya belanja aset penunjang tugas pokok dan fungsi instansi.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal

Uraian	Realisasi Tahun Anggaran 2018	Realisasi Tahun Anggaran 2017	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	291.958.130	528.590.120	-44,77
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	94.684.000	145.000.000	-34,70
Jumlah Belanja Kotor	386.642.130	673.590.120	-42,60
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah	386.642.130	673.590.120	-42,60

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2017 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2018 mengalami prosentase yang sama sebesar 0,00 persen dibandingkan Tahun Anggaran 2017. Hal ini disebabkan tidak terdapatnya alokasi dana untuk pengadaan tanah yang akan digunakan sebagai sarana dan prasarana pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi.

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp291.958.130, mengalami penurunan sebesar 44,77 persen bila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2017 yaitu sebesar Rp528.590.120. Hal ini disebabkan oleh menurunnya pengadaan peralatan dan mesin untuk

menunjang pelaksanaan tupoksi instansi.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal

Uraian	Realisasi Tahun Anggaran 2018	Realisasi Tahun Anggaran 2017	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	291.958.130	528.590.120	-44,77
Jumlah Belanja Kotor	291.958.130	528.590.120	-44,77
Pengembalian Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-	-
Jumlah	291.958.130	528.590.120	-44,77

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2017 adalah masing-masing sebesar Rp94.684.000 dan Rp145.000.000. Realisasi belanja gedung dan bangunan Tahun Anggaran 2018 mengalami penurunan sebesar -34,70 persen yang berasal dari menurunnya pengadaan gedung dan bangunan penunjang kegiatan tupoksi instansi.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung Dan Bangunan

Uraian	Realisasi Tahun Anggaran 2018	Realisasi Tahun Anggaran 2017	Naik (Turun) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	94.684.000	-	-
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	-	145.000.000	-100,00
Jumlah Belanja Kotor	94.684.000	145.000.000	-34,70
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah	94.684.000	145.000.000	-34,70

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2017 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi Tahun Anggaran 2018 mengalami prosentase yang sama sebesar

0,00 persen dibandingkan realisasi tahun anggaran lalu. Hal ini disebabkan tidak terdapatnya alokasi nilai aset jalan, irigasi, dan jaringan jaringan dalam rangka mendukung rencana strategis.

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2017 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp4.914.822. Realisasi Tahun Anggaran 2018 mengalami penurunan sebesar -100,00 persen dibandingkan Tahun Anggaran 2017. Hal ini disebabkan menurunnya pengadaan aset tetap lainnya/aset lainnya untuk penunjang pelaksanaan rencana strategis instansi.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya

Uraian	Realisasi Tahun Anggaran 2018	Realisasi Tahun Anggaran 2017	Naik (Turun) %
Belanja Modal Lainnya	-	4.914.822	-100,00
Jumlah Belanja Kotor	-	4.914.822	-100,00
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah	-	4.914.822	-100,00

*Belanja
Bantuan Sosial
Rp0*

B.6 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2017 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2018 mengalami prosentase yang sama sebesar 0,00% dibandingkan Tahun Anggaran 2017. Belanja bantuan sosial merupakan belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

Bantuan ini diberikan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial misalnya rendahnya tingkat pendidikan yang disebabkan karena banyaknya daerah miskin.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Kas di
Bendahara
Pengeluaran
Rp. 0*

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2017 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

Keterangan	Tahun Anggaran 2018	Tahun Anggaran 2017
Uang Tunai	-	-
Rekening Bank	-	-
Jumlah	-	-

*Kas di
Bendahara
Penerimaan
Rp0*

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar masing-masing Rp0 dan Rp0. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan

Keterangan	Tahun Anggaran 2018	Tahun Anggaran 2017
Uang Tunai	-	-
Rekening Bank	-	-
Jumlah	-	-

*Kas Lainnya
dan Setara
Kas Rp0*

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

*Piutang PNB
Rp0*

C.4 Piutang PNB

Saldo Piutang PNB per tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp0. dan Rp0. Piutang PNB merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya.

*Bagian Lancar
Tagihan
TP/TGR Rp0*

C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan atau kurang.

*Bagian Lancar
TPA Rp0*

C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –
Piutang Lancar
Rp0*

C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Lancar

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan piutang tak tertagih - piutang lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur.

*Belanja
Dibayar di
Muka
Rp 6.448.560*

C.8 Belanja Dibayar di Muka

Saldo Beban Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp6.448.560 dan Rp20.801.400. Beban dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Beban Dibayar di Muka adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Dibayar di Muka

Jenis	Tahun Anggaran 2018	Tahun Anggaran 2017
Pembayaran internet	-	-
Pembayaran sewa peralatan dan mesin	-	-
Pembayaran sewa gedung kantor	-	-
Pembayaran persekot gaji	6.448.560	20.801.400
Jumlah	6.448.560	20.801.400

*Uang muka
belanja Rp0*

C.9 Uang Muka Belanja

Saldo Uang Muka Belanja per tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Uang Muka Belanja merupakan piutang yang timbul akibat Pemerintah telah melakukan pembayaran lebih dahulu tetapi barang/jasa dari pihak lain tersebut sampai pada akhir periode pelaporan belum diterima.

*Pendapatan
yang Masih
Harus Diterima
Rp0*

C.10 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0, merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum disampaikan tagihannya.

*Persediaan
Rp 1.540.300*

C.11 Persediaan

Nilai Persediaan per tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp1.540.300 dan Rp3.668.600.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan

Jenis	Tahun Anggaran 2018	Tahun Anggaran 2017
Barang Konsumsi	1.121.300	2.666.400
Bahan untuk Pemeliharaan	419.000	1.002.200
Jumlah	1.540.300	3.668.600

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

*Persediaan
yang Belum
Diregister 0*

C.12 Persediaan yang Belum Diregister

Nilai Persediaan yang Belum Diregister per tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Persediaan yang Belum Diregister seharusnya tidak boleh ada pada laporan keuangan tahunan.

*Tagihan
TP/TGR
Rp0*

C.13 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

*Tagihan
Penjualan
Angsuran
Rp0*

C.14 Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –
Piutang Jangka
Panjang
Rp0*

C.15 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Saldo Penyisihan Piutang tak Tertagih- Piutang Jangka Panjang per tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Penyisihan Piutang tak tertagih–Piutang Jangka Panjang

merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dan Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Tanah

Rp18.399.971.000,-

C.16 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah pada satker lingkup Pengadilan Agama Pekanbaru per tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp18.399.971.000 dan Rp18.399.971.000.

Mutasi Aset Tetap Tanah adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2017	Rp	18.399.971.000
Mutasi Tambah		
Pembelian	Rp	-
Hibah	Rp	-
Transfer Masuk	Rp	-
Revaluasi Aset (Tambah)	Rp	-
Reklasifikasi	Rp	-
Mutasi Kurang		
Revaluasi Aset (Kurang)	Rp	-
Koreksi Kurang	Rp	-
Penghapusan	Rp	-
Saldo per 31 Desember 2018	Rp	18.399.971.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2018	Rp	-
Nilai Buku per 31 Desember 2018	Rp	18.399.971.000

Rincian Tanah

No	Luas	Lokasi	Nilai
1	1188 m2	Jl. Rawa Indah / Arifin Ahmad No. 1	2.408.819.000
2	1000 m2	Jl. Bunga Kertas. No. 21	1.322.847.000
3	1250 m2	Jl. Rawa Indah / Arifin Ahmad No. 1	2.263.379.000
4	400 m2	Jl. Rawa Indah / Arifin Ahmad No. 1	811.050.000
5	3892 m2	Jl. Datuk Setia Maharaja / Parit Indah	4.470.179.000
6	274 m2	Jl. Kembang Sari. Kel. Cinta Raja	371.498.000
7	9542 m2	Jl. Pembangunan I. Kel. Sidomulyo Timur	6.198.103.000
8	844 m2	Jl. Kesadaran. Kel. Tangkerang Labuai	554.096.000
Jumlah			18.399.971.000

Peralatan dan

Mesin

Rp 2.999.456.028

C.17 Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin per tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp2.999.456.028 dan Rp2.790.276.728. Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2017	Rp	2.790.276.728
Mutasi Tambah		
Pembelian	Rp	291.958.130
Hibah	Rp	-
Transfer Masuk	Rp	-
Revaluasi Aset (Tambah)	Rp	-
Koreksi Tambah	Rp	-
Mutasi Kurang		
Revaluasi Aset (Kurang)	Rp	-
Koreksi Kurang	Rp	-
Penghentian aset dari penggunaan	Rp	82.778.830
Penghapusan	Rp	-
Saldo per 31 Desember 2016	Rp	2.999.456.028
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2018	Rp	(2.031.335.560)
Nilai Buku per 31 Desember 2016	Rp	968.120.468

Mutasi transaksi penambahan peralatan dan mesin berupa pembelian komputer unit berupa PC, alat pengolah data dan meubeler senilai Rp. 291.958.130,- dan penghentian penggunaan asset dari penggunaan senilai Rp. 82.778.830,-.

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Gedung dan

Bangunan

Rp 10.950.485.240

C.18 Gedung dan Bangunan

Saldo gedung dan bangunan per tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp10.950.485.240 dan Rp10.348.735.000. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal

pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2017	Rp	10.348.735.000
Mutasi Tambah		
Pembelian	Rp	94.684.000
Hibah	Rp	-
Transfer Masuk	Rp	-
Revaluasi Aset (Tambah)	Rp	507.066.240
Koreksi Tambah	Rp	-
Mutasi Kurang		
Revaluasi Aset (Kurang)	Rp	-
Koreksi Kurang	Rp	-
Penghentian aset dari penggunaan	Rp	-
Penghapusan	Rp	-
Saldo per 31 Desember 2018	Rp	10.950.485.240
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2018	Rp	(437.136.448)
Nilai Buku per 31 Desember 2018	Rp	10.513.348.792

Mutasi transaksi penambahan gedung dan bangunan berupa pembangunan ruang pos jaga satpam, kanopi ruang tunggu sidang serta parker mobil dinas senilai Rp. 94.684.000,- dan revaluasi aset tetap senilai Rp. 507.066.240,-.

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Jalan, Jaringan
dan Irigasi
Rp 68.696.200,-*

C.19 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp68.696.200 dan Rp68.696.200. Saldo tersebut terdiri dari instalasi jaringan teknologi informasi.

Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2017	Rp	68.696.200
Mutasi Tambah		
Pembelian	Rp	-
Hibah	Rp	-
Transfer Masuk	Rp	-
Revaluasi Aset (Tambah)	Rp	-
Koreksi Tambah	Rp	-
Mutasi Kurang		
Revaluasi Aset (Kurang)	Rp	-
Koreksi Kurang	Rp	-
Penghentian aset dari penggunaan	Rp	-
Penghapusan	Rp	-
Saldo per 31 Desember 2018	Rp	68.696.200
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2018	Rp	(16.944.884)
Nilai Buku per 31 Desember 2018	Rp	51.751.316

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan jaringan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Aset Tetap
Lainnya
Rp 977.900*

C.20 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp977.900 dan Rp1.415.900. Mutasi transaksi terhadap Aset Tetap Lainnya per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2017	Rp	1.415.900
Mutasi Tambah		
Pembelian	Rp	-
Hibah	Rp	-
Transfer Masuk	Rp	-
Revaluasi Aset (Tambah)	Rp	-
Koreksi Tambah	Rp	-
Mutasi Kurang		
Revaluasi Aset (Kurang)	Rp	-
Koreksi Kurang	Rp	-
Penghentian aset dari penggunaan	Rp	-
Penghapusan	Rp	-
Saldo per 31 Desember 2018	Rp	1.415.900
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2018	Rp	-
Nilai Buku per 31 Desember 2018	Rp	1.415.900

*Konstruksi
Dalam
Pengerjaan
Rp0*

C.21 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) merupakan pembangunan gedung dan bangunan pada Pengadilan Agama Pekanbaru yang proses pengerjaannya belum selesai sampai dengan tanggal neraca.

*Akumulasi
Penyusutan
Aset Tetap
Rp 2.485.416.892*

C.22 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp2.485.416.892 dan Rp2.044.744.512. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2018, sedangkan Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
Peralatan dan Mesin	2.999.456.028	2.031.335.560	968.120.468
Gedung dan Bangunan	10.950.485.240	437.136.448	10.513.348.792
Jalan Irigasi dan Jaringan	68.696.200	16.944.884	51.751.316
Aset Tetap Lainnya	1.415.900	-	1.415.900
Akumulasi Penyusutan	14.020.053.368	2.485.416.892	11.534.636.476

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Aset Tetap
yang Belum
Diregister Rp0*

C.23 Aset Tetap yang Belum Diregister

Saldo Aset Tetap yang Belum Diregister per tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Aset Tetap yang Belum Diregister bisa timbul ketika tidak tercatatnya data BMN di aplikasi SIMAKBMN sehingga data keuangan dan data barang berbeda.

*Aset Tak
Berwujud
Rp 8.881.972*

C.24 Aset Tak Berwujud

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp8.881.972 dan Rp8.881.972. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik. Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Goodwill	-
Hak Cipta	-
Royalti	-
Paten	-
Software	8.881.972
Lisensi	-
Hasil Kajian / Penelitian	-
Aset Tidak Berwujud Lainnya	-
Jumlah	8.881.972

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2017	Rp	8.881.972
Mutasi Tambah		
Pembelian	Rp	-
Hibah	Rp	-
Transfer Masuk	Rp	-
Revaluasi Aset (Tambah)	Rp	-
Koreksi Tambah	Rp	-
Mutasi Kurang		
Revaluasi Aset (Kurang)	Rp	-
Koreksi Kurang	Rp	-
Penghentian aset dari penggunaan	Rp	-
Penghapusan	Rp	-
Saldo per 31 Desember 2018	Rp	8.881.972
Akumulasi amortisasi s.d. 31 Desember 2018	Rp	(5.810.209)
Nilai Buku per 31 Desember 2018	Rp	3.071.763

Aset Lain-Lain

Rp 303.397.830

C.25 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp303.397.830 dan Rp0. Termasuk Aset Lain-Lain antara lain Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional satker lingkup Pengadilan Agama Pekanbaru serta dalam proses penghapusan dari BMN. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2017	Rp	-
Mutasi Tambah		
Reklasifikasi dari aset tetap	Rp	-
Mutasi Kurang		
Penggunaan kembali BMN yang dihentikan	Rp	-
Penghapusan BMN	Rp	(303.397.830)
Saldo per 31 Desember 2018	Rp	303.397.830
Akumulasi penyusutan s.d. 31 Desember 2018	Rp	(284.226.796)
Nilai Buku per 31 Desember 2018	Rp	19.171.034

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Aset Lainnya yang Belum Diregister Rp0

C.26 Aset Lainnya yang Belum Diregister

Nilai Aset Lainnya yang Belum Diregister per tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Aset Lainnya yang Belum Diregister seharusnya tidak boleh ada pada laporan keuangan tahunan.

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya Rp 290.037.005

C.27 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp290.037.005 dan Rp4.581.503. Rincian akumulasi amortisasi dan penyusutan aset lainnya adalah sebagai berikut:

*Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset
Lainnya*

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud	8.881.972	5.810.209	3.071.763
Goodwill	-	-	-
Hak Cipta	-	-	-
Royalti	-	-	-
Software	8.881.972	5.810.209	3.071.763
Lisensi	-	-	-
Hasil Kajian / Penelitian	-	-	-
Aset Tidak Berwujud Lainnya	-	-	-
Aset Lain-Lain	303.397.830	284.226.796	19.171.034
Jumlah	312.279.802	290.037.005	22.242.797

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

*Uang Muka
dari KPPN
Rp 0*

C.28 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

*Utang kepada
Pihak Ketiga
Rp 3.776.561*

C.29 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp3.776.561 dan Rp57.674.860. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12

(dua belas bulan). Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada lingkup Pengadilan Agama Pekanbaru per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Saldo Utang kepada Pihak Ketiga

No	Uraian	Jumlah
1	Belanja Pegawai yang masih harus dibayar	1.291.161
2	Belanja Barang yang masih harus dibayar	2.485.400
3	Belanja Modal yang masih harus dibayar	-
4	Belanja Bantuan Sosial yang masih harus dibayar	-
5	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	-
6	Dana Pihak Ketiga	-
Jumlah		3.776.561

*Pendapatan
Diterima di
Muka
Rp 2.205.000*

C.30 Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp2.205.000 dan Rp0. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNBK. Rincian Pendapatan Diterima di Muka dari pihak ketiga disajikan sebagai berikut:

Rincian Saldo Pendapatan Diterima di Muka

Uraian	Jumlah	Penjelasan
Badan Swasta	2.205.000	Sewa Gedung dan Bangunan
Instansi Pemerintah Lainnya	-	-
Badan Lainnya	-	-
Perorangan	-	-
Uraian	2.205.000	

*Utang yang
Belum
Ditagihkan Rp0*

C.31 Utang yang Belum Ditagihkan

Utang yang Belum Ditagihkan per tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Utang yang belum ditagihkan antara lain utang yang belum diterima tagihannya.

*Hibah
Langsung Yang
Belum
Disahkan Rp0*

C.32 Hibah Langsung Yang Belum Disahkan

Hibah Yang Langsung Belum Disahkan per tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0, merupakan kewajiban entitas satker yang menerima hibah untuk mengajukan pengesahan kepada BUN pengelola hibah.

*Utang
Kelebihan
Pembayaran
Pendapatan
Rp0*

C.33. Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan

Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan per tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Bila pada akhir periode pelaporan terdapat kelebihan pembayaran pajak/ PNBPN, namun pengembalian pajak/PNBPN tersebut belum direalisasikan, maka satuan kerja mencatatnya sebagai utang kelebihan bayar pajak/PNBPN.

*Utang Jangka
Pendek
Lainnya Rp0*

C.34. Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya per tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

*Ekuitas
Rp 29.958.419.572*

C.28 Ekuitas

Saldo Ekuitas per tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp29.958.419.572 dan Rp29.535.445.925. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Penjelasan lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan

PNBP

Rp. 35.990.480

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada per tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing adalah sebesar Rp35.990.480 dan Rp69.971.370. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak

Uraian	Realisasi TA 2018	Realisasi TA 2017	Naik (Turun) %
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	3.703.000	5.248.460	-29,45
Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	32.287.480	64.722.910	-50,11
Jumlah	35.990.480	69.971.370	-48,56

Pendapatan PNBP merupakan berasal dari persekot gaji pegawai dan pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan, penerimaan kembali belanja pegawai dan penerimaan kembali belanja modal tahun anggaran yang lalu.

Beban

Pegawai

Rp 12.526.547.600

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai per tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing adalah sebesar Rp12.526.547.600 dan Rp12.377.638.448. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai

URAIAN	Tahun Anggaran 2018	Tahun Anggaran 2017	Naik (Turun) %
Beban Gaji dan Tunjangan PNS	12.526.547.600	12.377.638.448	1,20
Jumlah	12.526.547.600	12.377.638.448	1,20

Beban

D.3 Beban Persediaan

Persediaan

Rp 53.807.200

Jumlah Beban Persediaan per tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing adalah sebesar Rp53.807.200 dan Rp59.620.500. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan

URAIAN	Tahun Anggaran 2018	Tahun Anggaran 2017	Naik (Turun) %
Beban Persediaan konsumsi	53.807.200	59.620.500	-9,75
Jumlah	53.807.200	59.620.500	-9,75

Beban Barang

D.4 Beban Barang dan Jasa

dan Jasa

Rp 717.739.227

Beban Barang dan Jasa per tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing adalah sebesar Rp717.739.227 dan Rp699.523.366. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas, serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa

URAIAN	Tahun Anggaran 2018	Tahun Anggaran 2017	Naik (Turun) %
Beban Barang Operasional	522.701.141	512.681.300	1,95
Beban Barang Non Operasional	390.750	528.000	-25,99
Beban Langganan Daya dan Jasa	186.967.336	179.026.566	4,44
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	7.680.000	7.287.500	5,39
Jumlah	717.739.227	699.523.366	2,60

Beban

Pemeliharaan

Rp 320.803.902

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan per tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing adalah sebesar Rp320.803.902 dan Rp230.989.623. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan

URAIAN	Tahun Anggaran 2018	Tahun Anggaran 2017	Naik (Turun) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	191.083.228	93.601.141	104,15
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	107.081.874	108.591.254	-1,39
Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	11.513.166	-100,00
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	22.638.800	17.284.062	30,98
Jumlah	320.803.902	230.989.623	38,88

Beban

Perjalanan

Dinas

Rp 39.360.000

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas per tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing adalah sebesar Rp39.360.000 dan Rp21.310.071. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan

dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas

URAIAN	Tahun Anggaran 2018	Tahun Anggaran 2017	Naik (Turun) %
Beban Perjalanan Biasa	35.310.000	18.330.071	92,63
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.050.000	2.980.000	35,91
Jumlah	39.360.000	21.310.071	84,70

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Rp0

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas.

Beban Bantuan Sosial Rp0

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial per tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0 . Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang sifatnya tidak terus-menerus dan selektif.

Beban

Penyusutan

dan Amortisasi

Rp 674.292.082

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi per tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing adalah sebesar Rp674.292.082 dan Rp576.813.851. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi

URAIAN	Tahun Anggaran 2018	Tahun Anggaran 2017	Naik (Turun) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	411.216.950	310.388.356	32,48
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	254.644.866	263.922.111	-3,52
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.717.406	1.889.031	-9,09
Jumlah Penyusutan	667.579.222	576.199.498	15,86
Beban Amortisasi Software	1.228.706	614.353	100,00
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	5.484.154	-	-
Jumlah Amortisasi	6.712.860	614.353	992,67
Jumlah	674.292.082	576.813.851	16,90

Beban

Penyisihan

Piutang Tak

Tertagih Rp0

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan

Piutang Tak Tertagih per tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

*Surplus dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp 7.680.539*

D.12 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional

URAIAN	Tahun Anggaran 2018	Tahun Anggaran 2017	Naik (Turun) %
Pendapatan Non Operasional			
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun	-	2,059,527	-100.00
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	1,391	-	-
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	7,260,548	-	-
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	1,011,100	657,170	53.86
Jumlah Pendapatan Non Operasional	8,273,039	2,716,697	204.53
Beban Non Operasional			
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	592,500	396,188	49.55
Jumlah Beban Non Operasional	592,500	396,188	49.55
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	7,680,539	2,320,509	230.99

**) Pendapatan/Beban Penyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO)*

Pos Luar Biasa **D.13 Pos Luar Biasa**

Rp0

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp 29.535.445.925

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp29.535.445.925 dan Rp18.240.519.132.

Defisit LO
Rp 14.288.878.992

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Surplus(Defisit) LO untuk periode yang berakhir per tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar -Rp14.288.878.992 dan -Rp13.893.603.980. Surplus(Defisit) LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

Dampak
Kumulatif
Perubahan
Kebijakan
Akuntansi/Kesalahan
Mendasar
Rp0

E.3.1 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/ Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir per tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Penyesuaian
Nilai Aset
Rp0

E.3.2 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir per tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

*Koreksi Nilai
Persediaan
Rp0*

E.3.3 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi atas nilai persediaan per tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

*Selisih
Revaluasi Aset
Tetap
Rp 0*

E.3.4 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir per tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp11.273.409.438.

*Koreksi Aset
Tetap Non
Revaluasi
Rp (51.835.800)*

E.3.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir per tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar -Rp51.835.800 dan -Rp1.280.786. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Tahun 2018

No	Jenis Aset Tetap	Koreksi
1	Koreksi Nilai Aset Tetap/ Aset Lainnya Non Revaluasi	-49.704.550
2	Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	(2.131.250)
Jumlah		-51.835.800

*Koreksi Lain-
Lain
Rp 0*

E.3.6 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir per tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan -Rp20.700.689. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

*Transaksi
Antar Entitas
Rp 14.763.688.439*

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir per tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp14.763.688.439 dan Rp13.937.102.810. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

No	Transaksi Antar Entitas	Nilai
1	Ditagihkan ke Entitas Lain	14,074,218,618
2	Diterima dari Entitas Lain	(45,457,419)
3	Transfer Keluar	-
4	Transfer Masuk	-
5	Pengesahan Hibah Langsung	734,927,240
6	Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
Jumlah		14,763,688,439

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga tanggal 31 Desember 2018, DDEL sebesar -Rp45.457.419 sedangkan DKEL sebesar

Rp14.074.218.618.

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp734.927.240 dari total Rp734.927.240 yang diterima sepanjang tahun 2018.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 adalah Rp0.

Rincian Pengesahan Hibah untuk tahun 2018 adalah sebagai berikut:

No	Penerima Hibah	Bentuk Hibah	Nilai
1	Sekretaris PA Pekanbaru	Barang	507.066.240
2	Sekretaris PA Pekanbaru	Barang	187.661.000
3	Sekretaris PA Pekanbaru	Barang	40.200.000
Total Pengesahan			734.927.240
Pengesahan Pengembalian Hibah			-
Jumlah			734.927.240

Rincian Penerimaan Hibah Langsung per Satker Tahun

2018 disajikan pada lampiran.

Ekuitas Akhir

Rp 29.958.419.572

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai ekuitas akhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp29.958.419.572 dan Rp29.535.445.925.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Pengadilan Agama Pekanbaru melakukan koreksi akun Penerimaan Negara Bukan Pajak sebanyak dua kali dengan rincian:

1. Koreksi Akun 423141 sejumlah Rp. 455.000 menjadi akun 425131 pada SPM 00001 dengan Nomor SP2D 180081505000001 tanggal 2 Januari 2018 dan SPM 00006 dengan Nomor SP2D 180081505000003 tanggal 1 Februari 2018.
2. Koreksi Akun 423991 sejumlah Rp. 4.160.280 menjadi akun 425991 pada SPM 00006 dengan Nomor SP2D 180081505000003 tanggal 1 Februari 2018.
3. Pengadilan Agama Pekanbaru menerima Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp734.927.240.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

F.2.1 PENGUNGKAPAN PENGELOLAAN UANG TITIPAN PIHAK KE-3

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Pekanbaru yaitu sebagai Badan Pelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan ialah menerima, memeriksa dan memutuskan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Dalam memeriksa dan memutuskan perkara yang di terima oleh Pengadilan Agama Pekanbaru terdapat biaya yang dititipkan oleh pihak ketiga yang ditampung pada rekening pemerintah lainnya dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Keadaan Keuangan					
	Saldo Awal 02 Januari 2018	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir 30 September 2018	Kas di Bank	Kas di Brankas
Biaya Perkara	150.930.900,00	1.082.278.300,00	1.046.298.000,00	186.911.200,00	182.336.100,00	4.575.100,00
Biaya Eksekusi	86.872.900,00	51.447.000,00	68.507.000,00	69.812.900,00	68.174.800,00	1.638.100,00
Biaya Konsinyasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	237.803.800,00	1.133.725.300,00	1.114.805.000,00	256.724.100,00	250.510.900,00	6.213.200,00

F.2.2 REKENING PEMERINTAH

Rekening Pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Agama Pekanbaru adalah Rekening Bank BNI 46 Nomor 655833266 a.n BPG 008 PENGADILAN AGAMA PEKANBARU (402072) yang digunakan untuk menampung DIPA Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI dengan saldo akhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp. 0,-.

F.2.3 REVISI DIPA

Pengadilan Agama Pekanbaru melakukan revisi DJPBN untuk DIPA-005.01.2.402072/2018 sebanyak 5 kali dengan rincian sebagai berikut:

1. Revisi 1 pada tanggal 19 Maret 2018
2. Revisi 2 pada tanggal 13 Juli 2018
3. Revisi 3 pada tanggal 28 September 2018
4. Revisi 4 pada tanggal 30 November 2018
5. Revisi 5 pada tanggal 28 Desember 2018

PENGADILAN AGAMA PEKANBARU

Rincian Nilai Perolehan, Beban Penyusutan/Amortisasi, Akumulasi Penyusutan/Amortisasi
dan Nilai Buku Aset Tetap

Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2018

No	Aset Tetap	Masa	Nilai Perolehan	Akm. Peny.	Beban Peny.	Akm. Peny.	Nilai Buku
		Manfaat		s.d 31-12-2018	Per 31-12-2018	31-12-2018	Per 31-12-2018
A	Tanah						
1	Tanah	-	18,399,971,000	-	-	-	18,399,971,000
	Jumlah		18,399,971,000	-	-	-	18,399,971,000
B	Peralatan dan Mesin						
1	ALAT BANTU	7	0	420,000	-	(420,000)	-
2	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	5	423,515,003	429,166,217	22,348,786	(28,000,000)	-
3	ALAT UKUR	5	12,630,000	2,570,000	1,244,000	1,190,000	7,626,000
4	ALAT KANTOR	5	210,677,588	155,460,828	27,981,000	(51,140,800)	78,376,560
5	ALAT RUMAH TANGGA	5	1,031,335,630	682,526,702	144,981,264	(118,613,942)	322,441,606
6	ALAT STUDIO	10	24,262,000	19,196,200	3,392,400	(10,200,000)	11,873,400
7	ALAT KOMUNIKASI	4	42,677,250	24,019,650	5,053,800	(1,850,000)	15,453,800
8	UNIT ALAT LABORATORIUM		0	190,000	-	(190,000)	-
9	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA		10,843,050	1,807,175	722,870	-	8,313,005
10	KOMPUTER UNIT		704,771,687	351,244,814	124,553,625	(30,231,750)	259,204,998
11	PERALATAN KOMPUTER		251,255,320	108,082,866	52,656,205	11,982,650	78,533,599
12	ALAT KERJA PENERBANGAN		305,085,000	76,994,500	30,508,500	-	197,582,000
	Jumlah		3,017,052,528	1,851,678,952	413,442,450	-227,473,842	979,404,968
C	Gedung dan Bangunan						
1	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	50	6,924,778,240	92,358,607	140,434,756	-	6,691,984,877
2	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL		2,374,311,000	40,591,095	81,182,190	-	2,252,537,715
3	TUGU/TANDA BATAS		1,651,396,000	49,541,880	33,027,920	-	1,568,826,200
	Jumlah		10,950,485,240	182,491,582	254,644,866	-	10,513,348,792
D	Irigasi						
1	BANGUNAN AIR IRIGASI		13,958,000	174,475	348,950	-	13,434,575
	Jumlah		13,958,000	174,475	348,950	0	13,434,575
E	Jaringan						
1	JARINGAN LISTRIK		54,738,200	15,053,003	1,368,456	-	38,316,741
	Jumlah		54,738,200	15,053,003	1,368,456	0	38,316,741
F	Aset Tetap Yang Tidak Digunakan						
1	ALAT BANTU		420,000	-	-	420,000	-
2	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR		28,000,000	-	-	28,000,000	-
3	ALAT KANTOR		59,126,000	-	-	59,126,000	-
4	ALAT RUMAH TANGGA		146,423,730	136,000	5,365,404	122,658,042	18,264,284
5	ALAT STUDIO		10,200,000	-	-	10,200,000	-
6	ALAT KOMUNIKASI		1,850,000	-	-	1,850,000	-
7	UNIT ALAT LABORATORIUM		190,000	-	-	190,000	-
8	KOMPUTER UNIT		46,730,500	-	-	46,730,500	-
9	PERALATAN KOMPUTER		10,372,600	-	118,750	10,135,100	118,750
	Jumlah		303,312,830	136,000	5,484,154	279,309,642	18,383,034
Total			32,739,517,798	2,049,534,012	675,288,876	51,835,800	29,962,859,110

Lampiran II : Daftar Hibah langsung Berupa Uang/Barang/Jasa

PENGADILAN AGAMA PEKANBARU

Daftar Hibah Langsung Berupa Uang/Barang/Jasa
Per 31 Desember 2018

No	Nama Penerima Hibah	Bentuk Hibah	Sumber Dana	Nilai Hibah	Sudah Disahkan	Belum Disahkan	
						Nilai	Ket.
1.	Sekretaris Pengadilan Agama Pekanbaru	Gedung dan Bangunan		507.066.240	507.066.240	-	
2.	Sekretaris Pengadilan Agama Pekanbaru	Peralatan dan Mesin		187.661.000	182.381.000	-	
3.	Sekretaris Pengadilan Agama Pekanbaru	Peralatan dan Mesin		40.200.000	40.200.000		
Jumlah				694.727.240	694.727.240	-	